

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI PULAU TANJUNG MELAGAN KOTA BATAM

Oleh:

Keyza Regita Fitani
NIM : 2105010049

ABSTRAK

Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan akuntabilitas publik. Di Pulau Tanjung Melagan, Kota Batam, ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan utama akibat keterbatasan infrastruktur dan sulitnya akses ke wilayah hinterland. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam dalam penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan, dengan menggunakan teori akuntabilitas J. Spiro sebagai kerangka analisis yang meliputi tiga indikator utama: akuntabilitas (*accountability*), kewajiban (*obligation*), dan penyebab (*cause*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Lurah Galang Baru, serta warga Pulau Tanjung Melagan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, belum terimplementasi secara substantif. Mekanisme perencanaan partisipatif seperti Musrenbang masih bersifat prosedural dan tidak menjangkau kebutuhan riil warga. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dua arah menyebabkan warga tidak mengetahui peran dinas terkait. Dari sisi kewajiban, meskipun secara normatif pemerintah mengakui tanggung jawabnya, pelaksanaannya terbatas oleh kendala teknis, birokrasi, dan pengalihan peran ke lembaga non-pemerintah. Sedangkan penyebab lemahnya tanggung jawab pemerintah mencakup keterbatasan sumber daya alam, birokrasi yang kompleks, lemahnya koordinasi antarinstansi, pelayanan yang pasif, keterbatasan anggaran, serta rendahnya literasi masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Penyediaan air bersih, Tanggung Jawab Pemerintah

**GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN PROVIDING CLEAN WATER IN
TANJUNG MELAGAN ISLAND, BATAM CITY**

By:

Keyza Regita Fitani
NIM: 2105010049

ABSTRACT

The provision of clean water is a basic need that must be met by the government as a form of social responsibility and public accountability. In Tanjung Melagan Island, Batam City, the availability of clean water is still a major challenge due to limited infrastructure and difficult access to the hinterland area. This study aims to analyze the role and responsibility of the Batam City Government in providing clean water on Tanjung Melagan Island, using J. Spiro's accountability theory as an analytical framework that includes three main indicators: accountability, obligation, and cause. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The informants of the study included the Public Works and Spatial Planning Agency, the Head of Galang Baru Village, and residents of Tanjung Melagan Island. The results of the study showed that government accountability, especially the Public Works and Spatial Planning Agency (CKTR) of Batam City, has not been implemented substantively. Participatory planning mechanisms such as Musrenbang are still procedural and do not reach the real needs of residents. Lack of socialization and two-way communication causes residents to be unaware of the role of the relevant agencies. In terms of obligations, although the government normatively acknowledges its responsibility, its implementation is limited by technical constraints, bureaucracy, and the transfer of roles to non-governmental institutions. Meanwhile, the causes of weak government responsibility include limited natural resources, complex bureaucracy, weak coordination between agencies, passive services, limited budget, and low public literacy.

Keywords: *Accountability, Provision of clean water, Government Responsibility*